



**PENATAAN KENDARAAN BESAR DI SUMBU FILOSOFI**

# Pemkot Tampung Masukan Pelaku Industri Pariwisata

**YOGYA (MERAPI)** - Pemerintah Kota Yogyakarta mulai merumuskan kebijakan penataan akses kendaraan besar di kawasan inti Sumbu Filosofi, menyusul meningkatnya dampak kehadiran bus pariwisata.

Di satu sisi, kendaraan tersebut mendorong pertumbuhan ekonomi melalui lonjakan kunjungan wisatawan, namun di sisi lain juga memicu persoalan kapasitas jalan, kenyamanan pedestrian, keselamatan pengguna jalan, hingga kelestarian ruang heritage.

Penataan akses kendaraan besar di kawasan inti Sumbu Filosofi bukan untuk membatasi aktivitas wisata maupun usaha, melainkan menjaga keseimbangan antara pelestarian kawasan dan keberlanjutan ekonomi jangka panjang. Hal ini disampaikan Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo saat menghadiri Focus Group Discussion (FGD) bersama pelaku usaha, khususnya owner serta general manager hotel, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY dan Association of The Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA) DIY untuk menjangkau aspirasi dan masukan terkait pengelolaan Kawasan Inti Sumbu Filosofi yang berlangsung di Yogyakarta, Rabu (22/4).

Menurut Hasto, pertemuan yang digelar menjadi momentum penting untuk menyerap langsung ber-

bagai kebutuhan dan tantangan di lapangan. "Ini sebagai bahan masukan untuk menyusun aturan-aturan ketika secara bertahap kita menuju pada full pedestrian. Sekali lagi, secara bertahap dan tentu dengan berbagai macam catatan. Catatannya seperti apa, tahapannya seperti apa, sangat tergantung dari kondisi real di lapangan," ujar Hasto.

Berbagai masukan yang muncul dalam forum tersebut akan menjadi bahan kajian pemerintah. Salah satunya terkait usulan agar bus dari Terminal Ngabean tidak melintas hingga Titik Nol Kilometer dan Malioboro, namun tetap diperbolehkan mendekati melalui jalur tertentu seperti belok ke kiri ke arah Jalan Bhayangkara untuk memudahkan akses wisatawan.

"Ini menjadi kajian kami. Karena tetap tidak ke Titik Nol, tidak ke Malioboro, tetapi masih dekat untuk memudahkan akses mereka," ujarnya.

Selain itu, usulan mengenai pemanfaatan lahan alternatif untuk parkir bus seperti bekas pabrik es, hingga penggunaan lahan parkir milik swasta juga menjadi perha-

tian pemerintah. Tak hanya itu, Hasto juga menilai masukan terkait sosialisasi kebijakan lebih dini kepada operator bus dan wisatawan sangat penting agar ada kepastian informasi sejak awal. "Pemberitahuan lebih dini ini masukan yang sangat baik, sehingga wisatawan yang masuk Yogya dan bus-bus yang akan masuk sudah sedini mungkin diberitahukan. Harus ada konsistensi regulasi dan penegakan aturan yang tegas," tambahnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta, Lucia Daning Krisnawati mengatakan, kawasan Malioboro merupakan aset budaya dan sejarah yang memiliki nilai penting bagi Kota Yogyakarta.

Menurutnya, salah satu langkah yang perlu dilakukan untuk menjaga kelestarian adalah struktur tata ruang, meningkatkan kenyamanan pejalan kaki, serta menekan beban polusi di area inti adalah melalui penerapan kebijakan pembatasan lalu lintas kendaraan besar. Untuk itu, Pemkot Yogyakarta akan terus memastikan kebijakan tersebut tetap mempertimbangkan keberlangsungan aktivitas ekonomi masyarakat dan pelaku usaha pariwisata.

Selanjutnya, Ketua PHRI DIY, Dedy Pranowo Eryono, menyampaikan dukungan terhadap upaya



MERAPI-Dok Pemkot Yogyakarta  
**Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo bersama Wakil Wali Kota, Wawan Harmawan saat memimpin FGD pengelolaan Kawasan Inti Sumbu Filosofi di Yogya, Rabu (22/4).**

pelestarian Sumbu Filosofi. "Kami mendukung penuh Sumbu Filosofi ini. Akan lebih bagus lagi jika dipromosikan lebih luas ke wisatawan asing maupun domestik. Karena sampai saat ini banyak yang belum tahu apa itu Sumbu Filosofi, padahal ini sudah ditetapkan UNESCO," ujarnya. Menurut Dedy, promosi yang lebih gencar diharapkan dapat memberi dampak positif bagi hotel-hotel anggota PHRI, sehingga tidak hanya merasakan dampak kebijakan yang bersifat pembatasan.

Selaras dengan hal tersebut, salah satu perwakilan ASITA atau Perkumpulan Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia, Trianto Sumarso, menyoroti persoalan akses dan kantong parkir bus wisata yang hingga kini masih menjadi tantangan bagi biro perjalanan wisata. Ia mengusulkan agar pemerintah segera menetapkan titik-titik kantong parkir resmi berikut aksesibilitasnya, termasuk kemungkinan pemanfaatan lokasi alternatif yang lebih dekat dengan pusat kota. (\*)

| Instansi            | Nilai Berita | Sifat | Tindak Lanjut   |
|---------------------|--------------|-------|-----------------|
| 1. Walikota         | Netral       | Biasa | Untuk Diketahui |
| 2. Wakil Walikota   |              |       |                 |
| 3. Dinas Pariwisata |              |       |                 |

Yogyakarta, 18 Mei 2026  
 Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
 NIP. 19690723 199603 1 005